



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 658 /KM.1/2008

TENTANG

PENOMORAN DAN PEMBERIAN KODE SURAT  
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN TINGKAT PUSAT

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, dipandang perlu mengatur kembali penomoran dan pemberian kode surat di lingkungan Departemen Keuangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penomoran dan Pemberian Kode Surat di Lingkungan Departemen Keuangan Tingkat Pusat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;
  5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1685/KM/8/12/1976 tentang Penyeragaman Sistem Penomoran/Pemberian Kode Surat dalam Lingkungan Departemen Keuangan;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.01/2005 tentang Tata Naskah Dinas Departemen Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 303/PM.1/2006;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENOMORAN DAN PEMBERIAN KODE SURAT DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN TINGKAT PUSAT.

/ PERTAMA ...



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- PERTAMA** : Menetapkan penomoran dan pemberian kode surat unit organisasi di lingkungan Departemen Keuangan tingkat pusat, sebagaimana tercantum pada Lampiran I sampai dengan Lampiran XX Keputusan Menteri Keuangan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini.
- KEDUA** : Penomoran dan pemberian kode surat unit organisasi instansi vertikal di lingkungan Departemen Keuangan ditetapkan secara terpisah dari Keputusan Menteri Keuangan ini.
- KETIGA** : Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, sepanjang mengenai asas dan sistem penomoran dan pemberian kode surat, tetap berlaku sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-1685/KM/8/12/1976.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ini, maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor 617/KMK.01/2006 tentang Penomoran dan Pemberian Kode Surat di Lingkungan Departemen Keuangan Tingkat Pusat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 617/KM.1/2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 617/KMK.01/2006 tentang Penomoran dan Pemberian Kode Surat di Lingkungan Departemen Keuangan Tingkat Pusat dinyatakan tidak berlaku.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan para Kepala/Ketua Badan di lingkungan Departemen Keuangan;
3. Para Kepala Biro, para Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan, para Direktur, para Inspektur, dan para Kepala Pusat di lingkungan Departemen Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 September 2008

a.n. MENTERI KEUANGAN,  
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

MULIA P. NASUTION  
NIP. 060046519

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto  
NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KODE SURAT UNIT ORGANISASI  
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN  
DEPARTEMEN KEUANGAN**

**LAMPIRAN V**  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 658 /KM.1/2008 TENTANG  
PENOMORAN DAN PEMBERIAN KODE  
SURAT DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN  
KEUANGAN TINGKAT PUSAT

NO.	NAMA UNIT ORGANISASI	KODE SURAT
(1)	(2)	(3)
1.	<b>Direktorat Jenderal Anggaran</b>	... / AG / ...
2.	<b>Sekretariat Direktorat Jenderal</b>	... / AG.1 / ...
3.	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	... / AG.11 / ...
4.	Subbagian Organisasi	... / AG.111 / ...
5.	Subbagian Tata Laksana	... / AG.112 / ...
6.	Subbagian Pelaporan	... / AG.113 / ...
7.	Bagian Kepegawaian	... / AG.12 / ...
8.	Subbagian Pengembangan Pegawai	... / AG.121 / ...
9.	Subbagian Mutasi	... / AG.122 / ...
10.	Subbagian Umum Kepegawaian	... / AG.123 / ...
11.	Bagian Keuangan	... / AG.13 / ...
12.	Subbagian Penyusunan Anggaran	... / AG.131 / ...
13.	Subbagian Perbendaharaan	... / AG.132 / ...
14.	Subbagian Akuntansi dan Pelaporan	... / AG.133 / ...
15.	Bagian Umum	... / AG.14 / ...
16.	Subbagian Tata Usaha	... / AG.141 / ...
17.	Subbagian Rumah Tangga	... / AG.142 / ...
18.	Subbagian Perlengkapan	... / AG.143 / ...
19.	Kelompok Jabatan Fungsional	... / AG.100 / ...
20.	<b>Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara</b>	... / AG.2 / ...
21.	Subbagian Tata Usaha	... / AG.201 / ...
22.	Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro	... / AG.21 / ...
23.	Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan	... / AG.211 / ...
24.	Seksi Sektor Eksternal	... / AG.212 / ...
25.	Seksi Sektor Riil	... / AG.213 / ...
26.	Seksi Sektor Pemerintah	... / AG.214 / ...
27.	Subdirektorat Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara	... / AG.22 / ...
28.	Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung	... / AG.221 / ...
29.	Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung	... / AG.222 / ...
30.	Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak SDA	... / AG.223 / ...
31.	Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non SDA	... / AG.224 / ...

/32. Subdirektorat ....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(1)	(2)	(3)
32.	Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara I	... / AG.23 / ...
33.	Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Pegawai dan Belanja Barang	... / AG.231 / ...
34.	Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Modal	... / AG.232 / ...
35.	Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	... / AG.233 / ...
36.	Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Lainnya dan Belanja Kementerian/Lembaga	... / AG.234 / ...
37.	Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara II	... / AG.24 / ...
38.	Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang	... / AG.241 / ...
39.	Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi	... / AG.242 / ...
40.	Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus	... / AG.243 / ...
41.	Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus	... / AG.244 / ...
42.	Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal	... / AG.25 / ...
43.	Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri	... / AG.251 / ...
44.	Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri	... / AG.252 / ...
45.	Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah	... / AG.253 / ...
46.	Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal	... / AG.254 / ...
47.	Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN	... / AG.26 / ...
48.	Seksi Pengolahan Data APBN dan Fiskal Lainnya	... / AG.261 / ...
49.	Seksi Diseminasi APBN	... / AG.262 / ...
50.	Seksi Statistik Keuangan Pemerintah	... / AG.263 / ...
51.	Seksi Dukungan Teknis Penyusunan APBN	... / AG.264 / ...
52.	Kelompok Jabatan Fungsional	... / AG.200 / ...
53.	<b>Direktorat Anggaran I</b>	... / AG.3 / ...
54.	Subbagian Tata Usaha	... / AG.301 / ...
55.	Subdirektorat Anggaran IA	... / AG.31 / ...
56.	Seksi Anggaran IA-1	... / AG.311 / ...
57.	Seksi Anggaran IA-2	... / AG.312 / ...
58.	Seksi Anggaran IA-3	... / AG.313 / ...
59.	Seksi Anggaran IA-4	... / AG.314 / ...
60.	Subdirektorat Anggaran IB	... / AG.32 / ...
61.	Seksi Anggaran IB-1	... / AG.321 / ...
62.	Seksi Anggaran IB-2	... / AG.322 / ...
63.	Seksi Anggaran IB-3	... / AG.323 / ...
64.	Seksi Anggaran IB-4	... / AG.324 / ...

/65. Subdirektorat ..



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(1)	(2)	(3)
65.	Subdirektorat Anggaran IC	... / AG.33 / ...
66.	Seksi Anggaran IC-1	... / AG.331 / ...
67.	Seksi Anggaran IC-2	... / AG.332 / ...
68.	Seksi Anggaran IC-3	... / AG.333 / ...
69.	Seksi Anggaran IC-4	... / AG.334 / ...
70.	Subdirektorat Anggaran ID	... / AG.34 / ...
71.	Seksi Anggaran ID-1	... / AG.341 / ...
72.	Seksi Anggaran ID-2	... / AG.342 / ...
73.	Seksi Anggaran ID-3	... / AG.343 / ...
74.	Seksi Anggaran ID-4	... / AG.344 / ...
75.	Subdirektorat Anggaran IE	... / AG.35 / ...
76.	Seksi Anggaran IE-1	... / AG.351 / ...
77.	Seksi Anggaran IE-2	... / AG.352 / ...
78.	Seksi Anggaran IE-3	... / AG.353 / ...
79.	Seksi Anggaran IE-4	... / AG.354 / ...
80.	Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran I	... / AG.36 / ...
81.	Seksi Dukungan Teknis	... / AG.361 / ...
82.	Seksi Pengolahan Data Kementerian Negara/Lembaga	... / AG.362 / ...
83.	Kelompok Jabatan Fungsional	... / AG.300 / ...
84.	<b>Direktorat Anggaran II</b>	... / AG.4 / ...
85.	Subbagian Tata Usaha	... / AG.401 / ...
86.	Subdirektorat Anggaran IIA	... / AG.41 / ...
87.	Seksi Anggaran IIA-1	... / AG.411 / ...
88.	Seksi Anggaran IIA-2	... / AG.412 / ...
89.	Seksi Anggaran IIA-3	... / AG.413 / ...
90.	Seksi Anggaran IIA-4	... / AG.414 / ...
91.	Subdirektorat Anggaran IIB	... / AG.42 / ...
92.	Seksi Anggaran IIB-1	... / AG.421 / ...
93.	Seksi Anggaran IIB-2	... / AG.422 / ...
94.	Seksi Anggaran IIB-3	... / AG.423 / ...
95.	Seksi Anggaran IIB-4	... / AG.424 / ...
96.	Subdirektorat Anggaran IIC	... / AG.43 / ...
97.	Seksi Anggaran IIC-1	... / AG.431 / ...
98.	Seksi Anggaran IIC-2	... / AG.432 / ...
99.	Seksi Anggaran IIC-3	... / AG.433 / ...
100.	Seksi Anggaran IIC-4	... / AG.434 / ...

/101. Subdirektorat ....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

(1)	(2)	(3)
101.	Subdirektorat Anggaran IID	... / AG.44 / ...
102.	Seksi Anggaran IID-1	... / AG.441 / ...
103.	Seksi Anggaran IID-2	... / AG.442 / ...
104.	Seksi Anggaran IID-3	... / AG.443 / ...
105.	Seksi Anggaran IID-4	... / AG.444 / ...
106.	Subdirektorat Anggaran IIE	... / AG.45 / ...
107.	Seksi Anggaran IIE-1	... / AG.451 / ...
108.	Seksi Anggaran IIE-2	... / AG.452 / ...
109.	Seksi Anggaran IIE-3	... / AG.453 / ...
110.	Seksi Anggaran IIE-4	... / AG.454 / ...
111.	Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran II	... / AG.46 / ...
112.	Seksi Dukungan Teknis	... / AG.461 / ...
113.	Seksi Pengolahan Data Kementerian Negara/Lembaga	... / AG.462 / ...
114.	Kelompok Jabatan Fungsional	... / AG.400 / ...
115.	<b>Direktorat Anggaran III</b>	... / AG.5 / ...
116.	Subbagian Tata Usaha	... / AG.501 / ...
117.	Subdirektorat Anggaran IIIA	... / AG.51 / ...
118.	Seksi Anggaran IIIA-1	... / AG.511 / ...
119.	Seksi Anggaran IIIA-2	... / AG.512 / ...
120.	Seksi Anggaran IIIA-3	... / AG.513 / ...
121.	Seksi Anggaran IIIA-4	... / AG.514 / ...
122.	Subdirektorat Anggaran IIIB	... / AG.52 / ...
123.	Seksi Anggaran IIIB-1	... / AG.521 / ...
124.	Seksi Anggaran IIIB-2	... / AG.522 / ...
125.	Seksi Anggaran IIIB-3	... / AG.523 / ...
126.	Seksi Anggaran IIIB-4	... / AG.524 / ...
127.	Subdirektorat Anggaran IIIC	... / AG.53 / ...
128.	Seksi Anggaran IIIC-1	... / AG.531 / ...
129.	Seksi Anggaran IIIC-2	... / AG.532 / ...
130.	Seksi Anggaran IIIC-3	... / AG.533 / ...
131.	Seksi Anggaran IIIC-4	... / AG.534 / ...
132.	Subdirektorat Anggaran IIID	... / AG.54 / ...
133.	Seksi Anggaran IIID-1	... / AG.541 / ...
134.	Seksi Anggaran IIID-2	... / AG.542 / ...
135.	Seksi Anggaran IIID-3	... / AG.543 / ...
136.	Seksi Anggaran IIID-4	... / AG.544 / ...

/137. Subdirektorat



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

(1)	(2)	(3)
137.	Subdirektorat Anggaran III E	... / AG.55 / ...
138.	Seksi Anggaran III E-1	... / AG.551 / ...
139.	Seksi Anggaran III E-2	... / AG.552 / ...
140.	Seksi Anggaran III E-3	... / AG.553 / ...
141.	Seksi Anggaran III E-4	... / AG.554 / ...
142.	Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran III	... / AG.56 / ...
143.	Seksi Dukungan Teknis	... / AG.561 / ...
144.	Seksi Pengolahan Data Kementerian Negara/Lembaga	... / AG.562 / ...
145.	Kelompok Jabatan Fungsional	... / AG.500 / ...
146.	<b>Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	... / AG.6 / ...
147.	Subbagian Tata Usaha	... / AG.601 / ...
148.	Subdirektorat Penerimaan Minyak Bumi dan Gas Alam	... / AG.61 / ...
149.	Seksi Penerimaan Minyak Bumi	... / AG.611 / ...
150.	Seksi Penerimaan Gas Alam	... / AG.612 / ...
151.	Seksi Penerimaan Migas Lainnya	... / AG.613 / ...
152.	Seksi Verifikasi	... / AG.614 / ...
153.	Subdirektorat Penerimaan Panas Bumi dan Hilir Migas	... / AG.62 / ...
154.	Seksi Penerimaan Kegiatan Usaha Panas Bumi	... / AG.621 / ...
155.	Seksi Penerimaan Kegiatan Usaha Hilir Migas	... / AG.622 / ...
156.	Seksi Verifikasi	... / AG.623 / ...
157.	Subdirektorat Penerimaan Non Kementerian	... / AG.63 / ...
158.	Seksi Penerimaan Non Kementerian I	... / AG.631 / ...
159.	Seksi Penerimaan Non Kementerian II	... / AG.632 / ...
160.	Seksi Penerimaan Non Kementerian III	... / AG.633 / ...
161.	Seksi Verifikasi	... / AG.634 / ...
162.	Subdirektorat Penerimaan Kementerian dan Sumber Daya Alam Non Migas	... / AG.64 / ...
163.	Seksi Penerimaan Kementerian I	... / AG.641 / ...
164.	Seksi Penerimaan Kementerian II	... / AG.642 / ...
165.	Seksi Penerimaan Sumber Daya Alam Non Migas	... / AG.643 / ...
166.	Seksi Verifikasi	... / AG.644 / ...
167.	Subdirektorat Penerimaan Laba BUMN	... / AG.65 / ...
168.	Seksi Penerimaan Laba BUMN I	... / AG.651 / ...
169.	Seksi Penerimaan Laba BUMN II	... / AG.652 / ...
170.	Seksi Verifikasi	... / AG.653 / ...
171.	Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis PNB	... / AG.66 / ...

/172. Seksi ...



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

(1)	(2)	(3)
172.	Seksi Data dan Dukungan Teknis PNBP I	... / AG.661 / ...
173.	Seksi Data dan Dukungan Teknis PNBP II	... / AG.662 / ...
174.	Seksi Data dan Dukungan Teknis PNBP III	... / AG.663 / ...
175.	Kelompok Jabatan Fungsional	... / AG.600 / ...
176.	<b>Direktorat Sistem Penganggaran</b>	... / AG.7 / ...
177.	Subbagian Tata Usaha	... / AG.701 / ...
178.	Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran	... / AG.71 / ...
179.	Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu	... / AG.711 / ...
180.	Seksi Pengembangan Sistem Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah	... / AG.712 / ...
181.	Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja	... / AG.713 / ...
182.	Seksi Monitoring dan Evaluasi Sistem Penganggaran	... / AG.714 / ...
183.	Subdirektorat Standar Biaya	... / AG.72 / ...
184.	Seksi Standar Biaya Khusus I	... / AG.721 / ...
185.	Seksi Standar Biaya Khusus II	... / AG.722 / ...
186.	Seksi Standar Biaya Khusus III	... / AG.723 / ...
187.	Seksi Standar Biaya Umum	... / AG.724 / ...
188.	Subdirektorat Harmonisasi Kebijakan Penganggaran	... / AG.73 / ...
189.	Seksi Harmonisasi Kebijakan Penganggaran K / L	... / AG.731 / ...
190.	Seksi Harmonisasi Kebijakan Penganggaran Non K / L	... / AG.732 / ...
191.	Seksi Harmonisasi Kebijakan Penganggaran Lainnya	... / AG.733 / ...
192.	Subdirektorat Teknologi Informasi Penganggaran	... / AG.74 / ...
193.	Seksi Basis Data Penganggaran I	... / AG.741 / ...
194.	Seksi Basis Data Penganggaran II	... / AG.742 / ...
195.	Seksi Pengembangan Sistem Informasi Penganggaran	... / AG.743 / ...
196.	Seksi Dukungan Teknis Teknologi Informasi	... / AG.744 / ...
197.	Kelompok Jabatan Fungsional	... / AG.700 / ...

a.n. MENTERI KEUANGAN,  
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

MULIA P. NASUTION  
NIP. 060046519

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto  
NIP 060041107